

SISTEM EKONOMI ANTARA KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Oleh: Ruslan Abd Ghofur*

Abstrak

Pengetahuan tentang sistem ekonomi yang ada saat ini, terdominasi oleh dua sistem ekonomi utama (mainstream), yakni kapitalis dan sosialis. Dua sistem ini dianut serta mendominasi sistem ekonomi sebagian besar masyarakat dunia, bahkan hampir-hampir telah menutup makna dari keberadaan sistem ekonomi itu sendiri dan keberadaan sistem ekonomi lainnya. Kebijakan ekonomi secara khusus diarahkan untuk memecahkan persoalan ekonomi penting yang mesti dihadapi suatu sistem ekonomi. tentunya kebijakan yang diambil merupakan hasil dari pertimbangan dari banyak hal dan pilihan yang diatuhkan merupakan pilihan yang sesuai dengan keyakinan dan ideology bangsa.

Kata kunci : *Sistem ekonomi, Masalah ekonomi*

A. Pendahuluan

Perdebatan tentang sistem ekonomi dan permasalahan-permasalahan yang timbul karenanya, telah menjadi pengetahuan yang umum dibicarakan di masyarakat, khususnya bagi para ekonom bahkan masing-masing individu mempunyai prespektif yang berbeda dalam memahaminya.¹⁰⁹

Pengetahuan tentang sistem ekonomi yang ada saat ini, terdominasi oleh dua sistem ekonomi utama (mainstream), yakni kapitalis dan sosialis. Dua sistem ini dianut serta mendominasi sistem ekonomi sebagian besar masyarakat dunia, bahkan hampir-hampir telah menutup makna dari keberadaan sistem ekonomi itu sendiri dan keberadaan sistem ekonomi lainnya.

Sebelum lebih jauh melihat suatu sistem ekonomi, dan negara-negara yang menganut sistem-sistem tersebut, sudah semestinya untuk terlebih dahulu memahami makna dari sistem ekonomi, kebijakan yang ditimbulkan dan tujuan-tujuan dari keberadaannya. Untuk itu, hadirnya tulisan ini, bermaksud untuk membedah makna dari sistem ekonomi, kebijakan dan tujuannya, agar dalam

* Penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

¹⁰⁹ Diskusi dan perdebatan mengenai sistem ekonomi sangat intens dilakukan, sebagai misal di Indonesia, perdebatan dan diskusi mengenai sistem ekonomi melahirkan banyak sistem-sistem yang ditawarkan tokoh-tokoh penting dibalik kemunculannya seperti halnya sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi kerakyataan dan bahkan sistem ekonomi Islam. Tokoh-tokoh tersebut telah mengkritik dan memberi saran agar sistem ekonomi Indonesia harus berpihak kepada rakyat dan demi kemakmuran serta menjaga kepentingan rakyat, yang menurut Sjafruddin Prawiranegara dapat dibangun berdasarkan keadilan, moral dan norma agama, lihat Sjafruddin Prawiranegara, "Peran Agama dan Moral" dalam Pembangunan Masyarakat dan Ekonomi Indonesia, Djakarta, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 30. Lihat juga Sritua Arief, Ekonomi Kerakyataan Indonesia mengenai Bung Hatta, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002). hlm 199. Lihat juga Didi J. Rachbini (ed), Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1994). hlm. 21

mengadopsi suatu sistem ekonomi, suatu masyarakat/negara mempertimbangkan banyak factor yang agar mendukung terciptanya keselarasan dengan apa yang dicita-citakan masyarakat itu sendiri.

Agar maksud di atas tercapai, maka perlu kiranya mengajukan beberapa pertanyaan penting berikut; apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi dan faktor yang mempengaruhinya? serta bagaimana mewujudkan tujuan dari suatu sistem ekonomi?

B. Sistem Ekonomi dan Kedudukannya

1. Definisi sistem ekonomi dan kebijakannya

Sistem ekonomi menurut pendapat Kyoto Sheridan merupakan cara manusia (individu/kelompok) mewujudkan aktifitas ekonomi dalam mendapatkan kebahagiaan.¹¹⁰ Lebih jelasnya sistem ekonomi diartikan sebagai cara sesuatu ekonomi disusun, dikawal dan dilaksanakan, merupakan bagian dari sistem sosial yang antara keduanya tidak bisa dipisahkan secara sembarangan.

Sistem merupakan seluruh pranata (lembaga) yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan tuntunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu sistem akan mempengaruhi pola berfikir dan bertindak masyarakat yang ada dalam sistem tersebut dan akan menjadi norma di masyarakat. Sedangkan institusi (lembaga) dalam suatu sistem adalah organisasi baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam melakukan kegiatan rutin maupun untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹¹¹

Paling tidak ada tiga persoalan utama yang harus dipecahkan oleh setiap sistem ekonomi yang ada dalam satu masyarakat/bangsa, yakni:

- a. Barang dan jasa apa yang hendak dihasilkan
- b. Bagaimana cara memproduksi barang dan jasa
- c. Untuk siapa barang tersebut dihasilkan dan bagaimana mendistribusikannya kepada masyarakat.

Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, peran negara selaku institusi yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat, bertugas memadukan, dan mengkoordinasikan upaya-upaya ekonomi seseorang, dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Begitu juga dengan kebijakan ekonomi, yang merupakan bagian dari kebijakan publik, diarahkan untuk memecahkan ketiga persoalan ekonomi tersebut dengan melibatkan lembaga-lembaga ekonomi yang ada seperti halnya pemerintah, pasar (swasta), dan rakyat (masyarakat luas).¹¹²

Sebagaimana dikemukakan Marshal bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.¹¹³

¹¹⁰ Kyoto Sheridan, *Emergensi Ekonomis system in Asia*, dalam Mubiyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 63

¹¹¹ Edi Suandi Hamid, *Modul Sistem Ekonomi*, Univesitas Terbuka (Dikti Depdiknas), 2007), hlm 1.3

¹¹²Ibid, hlm. 31

¹¹³Ibid, hlm.2.3

Seperti kebijakan publik misalnya, yang meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan transportasi, komunikasi pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik). Kebijakan sosial (termasuk kebijakan ekonomi) merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan.

Untuk itu, sebelum menjawab pertanyaan pokok di atas, suatu sistem ekonomi harus menentukan pilihan-pilihan kebijakan dalam mengatur ekonominya sebagai berikut:

- a. Motif untuk memproduksi barang; apakah untuk keuntungan (profit) atau kepentingan umum (public good).
- b. Kepemilikan; kepemilikan pribadi, negara atau kepemilikan umum.
- c. Peran pemerintah dalam proses produksi dan distribusi; minim atau secara penuh.
- d. Proses mengambil keputusan; demokratis atau ditator.
- e. Aktivitas ekonomi; bergantung pada pasar atau terencana.¹¹⁴

Pilihan tersebut, senada dengan pengaturan ekonomi yang dikemukakan Lane, Jan-eric dan Svante Ersson, yang mencakup empat hal:

- a. Pengorganisasian putusan-putusan ekonomi penting (sentralisasi atau desentralisasi).
- b. Penyediaan informasi dan koordinasi bagi masyarakat (pasar atau perencanaan terpusat).
- c. Pemilihan faktor-faktor produksi (pribadi, koperasi atau kolektif).
- d. Sistem perangsang (moral atau materiil).¹¹⁵

Dari pilihan-pilihan dalam mengambil kebijakan ekonomi, akan secara langsung menunjukkan sistem ekonomi yang digunakan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

2. Hubungan sistem ekonomi dan sistem sosial

Peran suatu sistem ekonomi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sangat terikat oleh hubungan dari keberadaan sebuah sistem ekonomi dengan sistem sosial, sistem alam dan sistem ilmu ekonomi itu sendiri. Sebagaimana Marx melihat hubungan antar-manusia yang terdapat dalam proses pertukaran komoditi, yang merupakan gambaran riil dari hubungan antara individu yang terjalin melalui pasar. Begitu juga gambaran kepentingan ekonomi yang melandasi bermainnya para politisi dalam menjaga kepentingan kapitalis,

¹¹⁴ Sultan Abu Ali, "Islamic Economic System", dalam Ahmad, Ausaf and Awan, Kasim Raza (ed), *Lecturer On Islamic Economics*, (Jeddah: IRTI IDB, tt), hlm. 132. Lihat juga, Richard L. Charson, *Comparative Economic System*, (New York: M. E Sharpe Inc, 1990), hlm. 4-6.

¹¹⁵ Mubyarto, *Membangun...*, hlm. 5

baik yang terjadi pada negara-negara eropa modern maupun di Indonesia sendiri dewasa ini.¹¹⁶

Perlu diingat, dalam melihat relasi antara sistem ekonomi dan sistem sosial, harus dipahami bahwa pada sistem sosial terbangun didalamnya doktrin agama, filosofi, ideologi maupun hukum yang tidak bisa dikesampingkan dan dipisahkan dengan sistem sosial begitu saja.

Jika sistem ekonomi dibiarkan tanpa mengindahkan sistem sosial (agama, ideology, falsafah), maka akan menimbulkan penolakan yang kuat terhadap penggunaan sistem ekonomi di masyarakat. Dan sebaliknya, jika satu sistem ekonomi dipaksakan dapat merusak tatanan sosial yang ada di masyarakat, meskipun pada awalnya sistem ekonomi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat itu sendiri.

Persoalan yang akan dihadapi setiap sistem ekonomi sering memiliki kesamaan, namun setiap sistem berbeda dalam memecahkan masalah yang dihadapi tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa setiap sistem akan saling mempengaruhi dan pada akhirnya akan menyisakan sistem yang paling dapat mewujudkan tujuan masyarakat dan bahkan membuat masyarakat terikat oleh sistem tersebut.

Sampai saat ini, telah banyak sistem-sistem yang timbul dan tenggelam bersama institusi pendukungnya. Tercatat dengan jelas dalam sejarah peradaban manusia, telah melahirkan bermacam ideologi yang melahirkan cara pandang terhadap dunia yang berbeda diantara satu dan lainnya. Dan nantinya akan terlahir banyak sistem-sistem ekonomi dan tujuan yang hendak dicapai.

Ironisnya perkembangan sistem ekonomi akhir-akhir ini sering dipisahkan dan mengabaikan perkembangan sistem sosial, sehingga kebijakan ekonomi yang dihasilkan menjadi tidak realistis dan relevan dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. Untuk memudahkan dalam memetakan setiap sistem ekonomi yang ada, dapat dilihat dari karakteristik dasar sistem tersebut sebagaimana dua sistem ekonomi utama yang ada.¹¹⁷

Dua mainstream sistem ekonomi dunia, pada awalnya terlahir dari interaksi terus-menerus antar keduanya yang saling bertolak-belakang dalam menawarkan teori ekonomi. Pemikiran Adam Smith (1723-1790) yang nantinya terkenal dengan kapitalisme murninya, serta tawaran Karl Marx (1818-1883) terhadap jawaban atas terjadinya jurang kesejahteraan antar kelas di masyarakat, yang nantinya menjadi cikal bakal system sosialis, menunjukkan interaksi dua

¹¹⁶ Kasus Lapindo mengidentifikasi adanya pengaruh ekonomi (kapital) sangat dominan dalam menghasilkan suatu kebijakan politik. Perkembangan terakhir dalam kasus ini, pemerintah menyatakan menolak membantu biaya kebutuhan pokok/makan korban Lumpur diluar peta terkena dampak pada PP No.14 tahun 2007 (Koran Tempo, Sabtu, 8 Maret 2008, Edisi No 242/TH.VII). Pendapat Marx tersebut dapat dilihat pada Edi Suandi Hamid, hlm. 1.10

¹¹⁷ Karakter dasar system dapat dilihat dari beberapa hal berikut:1. More private participation in the field of economic activities . 2. Free environment to compete in the economy; 3. Individuals and firms act for profit motive; 4. High freedom for choice to the consumers; 5. Government acts as a police state (http://www.economywatch.com/world_economy/world-economic-indicators/mixed-economy.html)

sistem yang sangat intens hingga mengasikkan evaluasi internal terhadap sistem asal, dan pengembangan sistem-sistem tersebut.

Pada sistem kapitalisme kesadaran akan ketidak berhasilan sistem kapitalis murni dalam mewujudkan kesejahteraan, melahirkan sistem kapitalis yang diatur oleh negara (*state kapitalism*) yang diusung oleh Friedrich List (1789-1846). Sistem *state kapitalism* juga disempurnakan oleh Adolf Wagner dengan menawarkan konsep *welfare state*. Lebih lanjut sistem kapitalisme ini juga dikoreksi oleh J.M Keynes (1936) yang menawarkan sistem ekonomi campuran (*mixed economy*).

Begitu pula pada sistem sosialis, kemampuan untuk mengevaluasi kelemahan secara internal sistem melahirkan banyak tokoh dan pemikiran dalam sistem ini. Diawali oleh pandangan Karl Heindrich Marx (1818-1883) yang anti akan pemikiran kapitalisnya Adam Smith yang dianggapnya telah membawa ketidakadilan dan melahirkan permasalahan sosial yang tertuang secara riil dalam teori materialisme dialektika, materialisme histories dan *das kapital*. Selanjutnya pemikiran Karl Marx dikembangkan oleh Althusser dengan teori strukturalisme, Antonio Gramsci dengan teori hegomoninya, Samir Amin dan Andre Grunder Frank dengan teori ketergantungan dan seterusnya.

Kebijakan yang terlahir untuk menjawab tiga pertanyaan pokok dari setiap sistem, antara sistem kapitalis dan sistem sosialis dapat dibedakan dibawah ini;

a. Kapitalis

- a.1 Kepemilikan individu (*private ownership of the means of production*)
- a.2 Didasarkan motive mencari keuntungan sebesar-besarnya (*profit motive*)
- a.3 Keputusan berdasar pada mekanisme pasar (*decision are taken in the market place*)
- a.4 Minimnya campurtangan pemerintah (*a minimal role for the government*)

b. Sosialis

- b.1 Kepemilikan umum (*public ownership of the mean of production*)
- b.2 Didasarkan pada motive kebutuhan public (*Public good is the motive*)
- b.3 Keputusan berdasarkan pada hal-hal yang telah direncanakan (*decision are taken through planning*)
- b.4 Pemerintah sebagai central dari seluruh aktifitas ekonomi (*government is the center of all aconomics activities*).¹¹⁸

Pertentangan yang timbul antara dua *mainstream* serta kritik internal, melahirkan sistem kapitalis dan sosialis gaya baru yang saat ini diadopsi banya Negara di dunia. Sangat jarang dan bahkan tidak ada Negara yang mengadopsi kapitalisme atau sosialisme murni sebagaimana yang diajarkan Adam Smith dan Karl Marx. Ini tidak lain disebabkan perkembangan ekonomi dan perubahan

¹¹⁸ Sultan Abu Ali, hlm. 132

sosial yang begitu pesat, serta timbulnya permasalahan-permasalahan yang ternyata tidak dapat diselesaikan oleh dasar dua sistem besar tersebut, seperti permasalahan alam (ekologi) dan sosial itu sendiri.¹¹⁹

*Tawaran yang dapat diajukan dalam hal ini adalah perlunya untuk melihat sistem sosial masyarakat dalam melahirkan paradigma sistem baru yang bersumber pada ideologi dan faktor-faktor politik yang mendukung berubahnya sistem ekonomi, sehingga ada harapan terlahirnya sistem baru yang lebih baik.*¹²⁰

Disinilah letak perlu hadirnya sistem ekonomi baru yang lebih pas dari dua sistem ekonomi besar tersebut, dan terlahir dari sistem sosial masyarakat baik ideology, agama, filsafat dan hukum yang diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan umat.

Kebijakan yang dimaksud merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan. Kebijakan dalam ekonomi masuk kedalam kebijakan sosial, yang merupakan cerminan dari kebijakan pemerintah yang terkait dengan tindakan yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan sosial.¹²¹

Kebijakan ekonomi secara khusus diarahkan untuk memecahkan tiga persoalan ekonomi penting yang mesti dihadapi suatu sistem ekonomi. tentunya kebijakan yang diambil merupakan hasil dari pertimbangan dari banyak hal dan pilihan yang diatuhkan merupakan pilihan yang sesuai dengan keyakinan dan ideology bangsa.

Perlu diingat, bahwa ada beberapa faktor penting yang dijadikan pertimbangan bagi negara dan masyarakatnya dalam merima suatu sistem ekonomi, sebagai berikut:

- a. The Historical and Ideological background
- b. The size and geographical location
- c. The level of development
- d. The degree of opennees
- e. The political system¹²²

Kesadaran bahwa sistem ekonomi merupakan bagian dari sistem sosial manusia, akan memberikan landasan yang cukup jelas bahwa perkembangan sistem ekonomi harus seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Sebagaimana pendapat dari Mubyarto bahwa sistem ekonomi yang baik bagi suatu masyarakat harus mampu menjadi aturan main yang dipatuhi seluruh

¹¹⁹Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosio-Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LSAF, 1999), hlm. 81, lihat juga Rizal Ramli et., *Libralisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 108

¹²⁰Bruno Dallago, *Comparative Economic...*, hlm. 1

¹²¹Marshall, dalam Edi Suandi, *Modul...*,^{hlm 2,3} dan komponen-komponen utama dalam kebijakan ekonomi terdiri dari, kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan perdagangan luar negeri.. Lihat Sritua Arief, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia*, (Bandung:Zaman Wacana Mulia, , cet.1,1998), hlm.23

¹²²Sultan Abu Ali, hlm. 131

warganya, dan untuk dapat dipatuhi sistem tersebut harus disusun sendiri oleh masyarakat, berdasarkan moral dan budaya masyarakat yang bersangkutan.¹²³

Sesungguhnya jika mengacu pada kesadaran bahwa sistem ekonomi merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat, tentunya tidak memerlukan waktu yang panjang untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Namun realitas yang ada, dengan hilangnya "kepercayaan diri" bahwa setiap bangsa di dunia khususnya Indonesia merupakan bangsa yang besar dan mandiri, membuat kita terhanyut oleh dua sistem utama yang belum tentu sesuai dengan keperibadian bangsa ini sendiri.

C. Tujuan Sistem Ekonomi Antara "Das Sein" Dan "Das Sollen"

Setiap masyarakat memiliki tujuan sosioekonomi tertentu, dan dalam sistem ekonomi mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan warganya, sehingga setiap negara "bebas" mengatur dan menetapkan kebijakan ekonomi yang dianggap paling tepat untuk mencapainya.

Tujuan dari suatu sistem ekonomi pada dasarnya sangat ditentukan oleh bagaimana sistem tersebut memandang dunia, yang menurut Umer Chapra memuat pertanyaan-pertanyaan tentang; bagaiman alam semesta muncul, makna tujuan hidup manusia, prinsip kepemilikan dan tujuan manusia memiliki sumberdaya-sumber daya yang dimiliki. Serta hubungan antara sebgaiian manusia dengan sebgaiian yang lain dan dengan lingkungan sekitar.¹²⁴

Pertanyaan di atas tentunya akan terjawab sesuai dengan sistem ekonomi yang dianut, yang nantinya akan melahirkan strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan.

Sebagaimana tujuan kegiatan ekonomi dalam sistem Kapitalis, yang *berorientasi untuk memperoleh kepuasan matriil sebanyaknya*, menghasilkan prinsip yang didominasi tiga gagasan; *perolehan, persaingan dan rasionalitas*, sehingga pelaku ekonomi bebas untuk mengusahakan keberhasilan ekonomi dengan cara apa saja yang dipilihnya. Sedangkan dalam Sosialis, bertujuan untuk *memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoriter demokratis pusat, dengan menghapuskan kepemilikan pribadi atas alat produksi, mengedepankan kebutuhan sosial, dengan motif pelayan sosial*.¹²⁵

Disamping itu, visi kemajuan ekonomi dan sosial dua sistem di atas berbeda. Jika sosialis menekankan pada keadilan sosial dan distributif, maka kapitalis menekankan pada akumulasi dan pertumbuhan dalam *frame work* kebebasan individu.¹²⁶

Jika pandangan dari suatu sistem ekonomi bahwa dunia disediakan untuk sepenuhnya kepentingan manusia tanpa ada batasan-batasan norma maka tujuan

¹²³ Mubyarto, hlm. 103

¹²⁴ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 4

¹²⁵ Tujuan Kapitalisme dan Sosialisme khususnya tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Encyklopaedia Britannica sebagaimana dikuti oleh M.A Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm. 311-317

¹²⁶ Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 104

yang terbentuk hanyalah untuk mencapai kepuasan maksimum. Ini berbeda dengan sistem ekonomi yang memandang bahwa keberadaan manusia, dan sumber-sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan norma-norma yang mengikat. Apa yang dimiliki adalah ciptaan Tuhan, tentunya akan melahirkan rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam menggunakan sumber daya-sumber daya yang terbatas.

Hasil logis dari beberapa pertanyaan tentang pandangan dunia dari satu sistem ekonomi, akan nampak dari kebijakan dan strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya.

Tidak dapat dinafikan terkadang tujuan sistem ekonomi yang dianut suatu bangsa diambilkan dari satu pandangan hidup tertentu, sedangkan kebijakan yang dilakukan mengadopsi pandangan hidup yang lain. Jika ini terjadi, tak disangkal akan terjadi konflik internal dalam sistem ekonomi yang berakibat pada sulitnya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Sehingga usaha untuk mewujudkan tujuan sistem ekonomi akan terjadi ketimpangan antara "das sein" dan "das sollen".

Dalam perekonomian nasional misalnya, terindikasi adanya konflik internal antara tujuan yang diambil dari pandangan hidup berdasar UUD 1945 dan sila-sila Pancasila, dengan kebijakan dan strategi yang cenderung kapitalis.

Berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila semestinya sistem ekonomi menjawab tiga pertanyaan pokok di atas dengan memproduksi barang-barang pokok yang menyangkut kebutuhan dasar (basic need) seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan memberikan kemanfaatan bagi hajat hidup orang banyak (public good).

Namun realitas yang ada kini, kebijakan yang diambil cenderung mementingkan kepentingan segelintir orang yang memiliki capital (modal). Sehingga sulitnya bagi mayoritas rakyat untuk mencukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, dan bahkan mahal biaya untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Hal ini merupakan cerminan dari kebijakan dan strategi yang diambil bersumber dari pandangan hidup yang berbeda dengan tujuan sistem ekonomi nasional.

D. Penutup

Kesadaran bahwa suatu sistem ekonomi suatu bangsa serta kebijakan yang diambil, tidak akan mampu mewujudkan tujuan apabila sistem yang digunakan jauh berbeda dengan kondisi sosial bangsa tersebut. Karena bagaimana pun, di dalam suatu bangsa terdapat sistem sosial (kepribadian, idologi, norma, falsafah dan hukum) yang melandasi terbentuknya bangsa tersebut.

Bahkan jika penggunaan suatu sistem ekonomi dipaksakan, maka yang terjadi adalah konflik internal, antara kebijakan, strategi dan tujuan yang berujung pada tidak tercapainya kesejahteraan sebagai tujuan bersama. Apabila ini terjadi pada bangsa Indonesia khususnya dan tidak ada upaya untuk mencari solusinya, maka pertanyaan yang timbul ialah sampai kapan rakyat di negara ini akan menunggu untuk merasakan kesejahteraan?

Wallah'alam

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ali, Sultan, "Islamic Economic System", dalam Ahmad, Ausaf and Awan, Kasim Raza (ed), *Lecturer On Islamic Economics*, Jeddah: IRTI IDB, tt
- Arief, Sritua, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia mengenang Bung Hatta*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- , *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, cet.1, 1998
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Charson, Richard L., *Comparative Economic System*, New York: M. E Sharpe Inc, 1990
- Dallago, Bruno, *Comparative Economic System: Facts and The Questions*, ttp, tt
- Haidar Naqvi, Syed Nawab, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- http://www.economywatch.com/world_economy/world-economic-indicators/mixed-economy.html
- Koran Tempo, Sabtu, 8 Maret 2008, Edisi No 242/TH. VII
- Mannan, M.A, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta; Dana Bakti Wakaf, 1997
- Mubiyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000
- Hamid, Edi Suandi, *Modul Sistem Ekonomi*, Univesitas Terbuka (Dikti Depdiknas), 2007
- Prawiranegara, Sjafruddin, "Peran Agama dan Moral" dalam *Pembangunan Masyarakat dan Ekonomi Indonesia*, Djakarta, Jakarta: Bulan Bintang, 1966
- Rachbini, Didi J. (ed), *Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1994
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosio-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LSAF, 1999
- Ramli, Rizal et., *Libralisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997